

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : *Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang*  
TAHUN ANGGARAN : *2023*

PROGRAM	Penyelenggaraan Pengawasan
KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
SUB KEGIATAN	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
KEGIATAN 2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
SUB KEGIATAN	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
KODE PROGRAM	6.01.02

ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan dalam urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT: Tahun 2021 sebanyak 60 obrik dan Tahun 2022 sebanyak 85 obrik</li> <li>• Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang</li> <li>• Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan meliputi kegiatan Audit, reviu, evaluasi, dan monitoring</li> <li>• Jumlah Auditor sebanyak 17 orang terdiri dari 8 orang perempuan dan 9 orang laki-laki</li> <li>• Pembinaan/peningkatan kualitas SDM masih terbatas. Diklat/Bimtek/Sosialisasi, terutama dalam pengiriman diklat teknis bidang pengawasan, terkait dengan padatnnya jadwal pemeriksaan dalam setahun.</li> <li>• Dengan minimnya jumlah Pengawas/Pemeriksa yang melaksanakan tugas, dengan pengiriman SDM mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi akan mengurangi jumlah SDM dan berdampak pada kualitas hasil pengawasan</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Semua auditor laki- laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam penugasan</li> <li>• <b>Partisipasi</b> Karena terbatasnya auditor pertama, Auditor muda kadang diperankan sebagai anggota tim</li> <li>• <b>Kontrol</b> Penugasan Pemeriksaan khusus yang tidak terencana karena disasarkan pada pengaduan masyarakat/ ASN terkait</li> <li>• <b>Manfaat</b> Perempuan dapat dibantu oleh laki-laki dalam melakukan pemeriksaan fisik/ kontruksi yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan</li> </ul> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum proporsionalnya jumlah Pemeriksa/ Pengawas yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan dalam setahun.</li> <li>• Auditor Muda lebih banyak dibandingkan Auditor Pertama sehingga peran dalam Tim menjadi turun setingkat dalam melaksanakan penugasan</li> </ul>
------------------	--

	<p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara masih terbatas</li> <li>• Pengaduan masyarakat yang masuk sehingga mengganggu jadwal PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah ditetapkan</li> </ul>		
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolok Ukur</b> Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan PKPT dengan Persentase Jumlah Jenis Pengawasan yang dilaksanakan sebesar 90%</p>		
	<p><b>3. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Output</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>• <b>Outcome</b> Persentase Jumlah Jenis Pengawasan yang dilaksanakan</li> </ul>		
<b>JUMLAH NGGARAN PROGRAM</b>	Rp. 695.616.000,-		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Sub Kegiatan 1</b>	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rencana Aksi : Tuntasnya Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring, dan Pengawasan Lainnya.	
		<b>Masukan</b>	Rp. 342.250.000,-
		<b>Keluaran</b>	Jumlah Laporan Audit
		<b>Hasil</b>	Jumlah Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring, dan Pengawasan Lainnya yang Tuntas Dilaksanakan
	<b>Sub Kegiatan 2</b>	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rencana Aksi : Menyelesaikan Seluruh Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus.	
		<b>Masukan</b>	RP. 99.300.000,-
		<b>Keluaran</b>	Jumlah Laporan Audit
		<b>Hasil</b>	Persentase Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Padang Panjang, 28 Maret 2022  
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE.

Pembina Utama Muda/ 19700405 199703 1 004

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

<b>SKPD</b>	: <i>Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang</i>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: <i>2023</i>
<b>PROGRAM</b>	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
<b>KODE PROGRAM</b>	6.01.03
<b>KEGIATAN</b>	Pendampingan dan Asistensi
<b>SUB KEGIATAN</b>	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah penduduk kota padang panjang pada tahun 2021 adalah sebanyak 60.137 jiwa, yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah penduduk laki-laki : 30.279</li><li>- Jumlah Penduduk Perempuan : 29.858</li></ul></li><li>• Jumlah laporan masuk melalui rumah aspirasi dan aplikasi lapor wali tahun 2021 adalah sebanyak 36 laporan dan sudah ditindak lanjuti Pelapor terdiri dari 18 orang laki-laki dan 15 orang perempuan dan 3 orang tidak diketahui identitasnya</li></ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Akses</b> Informasi terkait rumah aspirasi dan aplikasi lapor wali belum diketuhai secara menyeluruh oleh masyarakat Kota Padang Panjang</li><li>• <b>Partisipasi</b> Rendahnya minat masyarakat dalam melaporkan pengaduannya ke Rumah Aspirasi dan Aplikasi Lapor Wali</li><li>• <b>Kontrol</b> Tidak ada kewajiban kepada masyarakat untuk melaporkan pengaduannya sehingga tidak ada kontrol untuk masyarakat melaporkan pengaduan</li><li>• <b>Manfaat</b> Masyarakat tidak memperoleh manfaat karena tidak melaporkan pengaduannya</li></ul> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• OPD Terkait terlambat menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat</li><li>• Terbatasnya Anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sehingga beberapa Laporan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti</li></ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya Informasi terkait rumah aspirasi dan aplikasi lapor wali kepada masyarakat</li><li>• Rendahnya minat masyarakat dalam melaporkan pengaduan</li></ul>

<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>1. Tolok Ukur</b> Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan		
	<b>2. Indikator dan Target Kinerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Output</b> Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang telah selesai dilakukan</li> <li>• <b>Outcome</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Aksi PPK yang Tuntas 100% dilaksanakan</li> <li>• Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai Ditindaklanjuti</li> </ul> </li> </ul>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp. 337.073.707.-		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Seluruh Aksi PPK</li> <li>• Menindaklanjuti Seluruh Pengaduan Masyarakat</li> </ul>	
		<b>Masukan</b>	Rp. 215.308.700,-
		<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Aksi PPK dan Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> </ul>
		<b>Hasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Aksi PPK yang Tuntas 100% dilaksanakan</li> <li>• Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai Ditindaklanjuti</li> </ul>

Padang Panjang, 28 Maret 2022  
Inspektur



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE.

Pembina Utama Muda/ 19700405 199703 1 004